

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peran sentral dan strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia, sebab kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai manusia baik secara individu maupun kelompok dibentuk melalui pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan dapat membekali manusia menjadi cerdas, terampil, dan bertanggung jawab (*sense of responsibility*). Karakteristik sumber daya manusia yang diperlukan adalah integritas, inisiatif, intelegensia, keterampilan sosial (*social skills*), penuh daya (*resourcefulness*), imaginasi, keluwesan (*flexibility*), antusiasme (*enthusiasm*), rasa kepentingan (*a sence of urgency*), dan pandangan yang mendunia (*world view*). *Integritas* yaitu kepribadian kuat yang didasari nilai-nilai keyakinan dan ketaatan terhadap agama, etika dan moral, budaya yang tercermin dalam perilaku yang jujur, loyal, menghargai orang lain, dapat dipercaya. *Inisiatif* yaitu instink untuk memulai atau menindaklanjuti suatu rencana atau pekerjaan atas kehendak dan semangat dari dalam diri sendiri. *Intelegensia* yaitu kecerdasan atau kemampuan berfikir dan berbuat secara kreatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi. *Keterampilan sosial* yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan terutama kemampuan untuk melakukan pekerjaan melalui kegiatan bersama atau melalui orang lain. *Pemuh daya* yaitu kemampuan bertindak secara efektif dan menemukan hal-hal baru terutama pada saat menghadapi kesulitan. *Imajinasi* yaitu daya fikir untuk membentuk citra mental atau konsep tentang sesuatu yang belum ada pada saat

tertentu. *Keluwesan* yaitu kemampuan untuk menghadapi berbagai pilihan dan perubahan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang telah digariskan. *Semangat* yaitu perasaan dan kegairahan mendalam tentang sesuatu kejadian atau penyebab, keinginan, dan kegigihan yang kuat. *Rasa kepentingan* yaitu kesadaran yang jelas terhadap suatu potensi yang besar dalam situasi tertentu, sehingga berani berkorban untuk mencapai tujuannya. *Pandangan yang mendunia* yaitu pemahaman, kemampuan untuk mendunia, mensintesis, dan mengaitkan aktivitasnya dengan perkembangan mendunia, tetapi nilai-nilai dan misi organisasi sebagai tempat berkiprah tetap dipegang teguh.

Sebagai individu, setiap orang memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan, sehingga terbentuk manusia terdidik yang mempunyai kemampuan untuk: (1) memahami diri dan lingkungannya, (2) menyesuaikan diri atau menjadi pelaku dari suatu perubahan, (3) mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dimiliki melalui pendidikan dalam suasana belajar yang partisipatif untuk tumbuh kembangnya kreativitas peserta didik.

Kehidupan manusia terdidik tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Pandangan kaum behaviorisme menempatkan lingkungan sebagai faktor dominan terhadap terjadinya perubahan tingkah laku.

Pendidikan memiliki fungsi sebagai lembaga yang melakukan pelestarian nilai sosial budaya. Dalam setiap masyarakat ditemukan sistem belajar asli (*indigenous*) yang memiliki ketangguhan dan ketahanan dalam memelihara

keseimbangan kehidupan sosial. Sistem belajar asli merupakan sejarah berkembangnya pendidikan luar sekolah, dan pendidikan luar sekolah terus berkembang di masyarakat karena diperlukan keberadaannya.

Dengan mengacu pada UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Rujukan tersebut memberi keyakinan pentingnya posisi pendidikan luar sekolah, yang diharapkan dapat bersama-sama dengan pendidikan sekolah dalam menangani berbagai persoalan bangsa, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal.

Berdasarkan data statistik pendidikan tahun 1999, dari 205 juta penduduk Indonesia, sekitar 60 juta orang (28%) menjadi sasaran utama dari program pendidikan luar sekolah. Mereka terdiri atas buta huruf 18 juta orang, anak usia dini (0-9 tahun) yang belum terlayani pendidikan pra sekolah berjumlah 11 juta orang, tidak masuk dan putus sekolah berjumlah 7 juta orang, putus SLTP mencapai 8 juta orang, dan tidak sekolah serta tidak bekerja (usia 16-23 tahun) sebanyak 16 juta orang (Sihombing, 2001:184).

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk yang menjadi sasaran PLS cukup besar, dengan sebaran mulai usia dini sampai dewasa. Berdasarkan kondisi tersebut, berbagai program PLS harus terus dikembangkan dalam rangka melayani mereka, disesuaikan dengan kebutuhan dan faktor lainnya. Melalui berbagai program PLS, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan dirinya untuk mampu memberdayakan dirinya. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan luar sekolah berikut ini.

(1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat terpenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. (PP No. 73 tahun 1991, pasal 2).

Pendidikan luar sekolah memiliki peluang yang cukup luas untuk membelajarkan masyarakat, yang sasarannya dapat didasarkan pada segi usia, lingkungan sosial budaya, jenis kelamin, mata pencaharian, taraf pendidikan, maupun pada kelompok-kelompok khusus. Hal ini sesuai dengan pendapat Trisnamansyah (1986:80), yang mengemukakan bahwa "sasaran populasi PLS dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: usia, lingkungan sosial budaya, jenis kelamin, mata pencaharian, taraf pendidikan dan segi kelompok khusus, seperti anak-anak terlantar dan yang mengalami penyimpangan sosial".

Kajian empiris selama ini, memberikan gambaran bahwa program pendidikan luar sekolah terus berupaya dan beradaptasi dengan tuntutan serta perkembangan masyarakat, hal tersebut terlihat dari strategi yang dikembangkan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah (Dirjen PLSP), yaitu strategi pemberdayaan (*Empowering*) dengan konsep *Community Base Education (CBE)*.

Community Base Education mempunyai makna bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang sebagian besar keputusan-keputusannya dibuat oleh masyarakat (*education in which proportion of decisions are made by community*), (Nielsen, 2001:178). Dengan mengacu pada makna pendidikan berbasis masyarakat, kegiatan pendidikan luar sekolah harus didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu program pendidikan luar

sekolah harus berdasarkan pada kebutuhan nyata dan potensi yang ada pada masyarakat. Menurut Sihombing (2001:185) ada lima acuan untuk mengembangkan dan melaksanakan konsep pendidikan berbasis masyarakat, yaitu: *Pertama*, teknologi yang dipelajari hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di masyarakat. *Kedua*, adalah kelembagaan, artinya harus ada wadah yang statusnya jelas dimiliki, dipinjam atau dikelola, dikembangkan oleh masyarakat, dalam hal ini ditumbuhkan partisipasi masyarakat. *Ketiga*, adalah sosial, artinya program belajar harus bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. Oleh karena itu, program harus digali berdasarkan potensi lingkungan dan berorientasi pasar bukan berorientasi akademik semata. *Keempat*, kepemilikan program belajar, artinya kelembagaan harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. *Kelima*, organisasi, artinya aparat pendidikan luar sekolah tidak menangani sendiri programnya, melainkan bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan kelima aspek tersebut, menurut Sihombing (2001:186): pendidikan luar sekolah yang berbasis masyarakat itu mengandung makna yaitu pendidikan yang dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat, mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan dan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dirancang oleh masyarakat untuk membelajarkan masyarakat sehingga mereka berdaya. Hal tersebut mengandung makna, yaitu memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Konsep

pendidikan berbasis masyarakat mengandung makna dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Selanjutnya Watson (1991) dalam U. Sihombing mengemukakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki tiga elemen, yaitu: *Pertama*, mementingkan warga belajar. *Kedua*, program dimulai dari perspektif yang kritis, yang mengandung makna pentingnya perbaikan kemampuan dasar masyarakat, meningkatkan kemampuan dasar masyarakat, meningkatkan kemampuan yang sudah ada, dan partisipasi dalam setiap kegiatan. *Ketiga* program belajar harus berlokasi di masyarakat, menjawab kebutuhan belajar masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dan program itu dirancang, diputuskan, serta diatur oleh masyarakat sehingga mereka membentuk kesatuan yang lebih besar.

Melalui pendidikan berbasis masyarakat, diharapkan dapat memobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan.

Melalui konsep pendidikan berbasis masyarakat, program-program pendidikan luar sekolah diharapkan dapat menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial budaya masyarakat. Kelembagaan pendidikan luar sekolah dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat serta merupakan milik masyarakat, diwujudkan dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pemerintah mendudukkan posisi dan berperan sebagai motivator dan fasilitator. Strategi ini ditempuh untuk meningkatkan peran serta masyarakat (partisipasi) dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan luar sekolah.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah merupakan sentra pembelajaran masyarakat yang ada di sekitar kehidupan masyarakat. Pelaksanaannya adalah dengan menggali dan memadukan seluruh potensi yang ada di masyarakat, sehingga menjadi sinergi yang ampuh untuk membantu/membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sihombing (2001:189) bahwa:

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat dalam rangka usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi dan bakat warga masyarakat. PKBM bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatn program bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungannya.

Pendapat Sihombing senada dengan yang dirumuskan oleh BPPLSP (2003), yaitu:

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dan sumber informasi bagi masyarakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, berisi berbagai jenis keterampilan fungsional yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diharapkan terjadi kegiatan pembelajaran dalam masyarakat dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada di sekitar lingkungan masyarakat, agar masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Melalui PKBM diharapkan: 1) terjadinya kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan belajar masyarakat, 2) terjadinya keberlanjutan program pembelajaran, sehingga warga belajar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang pendidikan,



kegiatan, lingkungan, agama, budaya, dan pendapatan, 3) dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi terhadap pembangunan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya, bahkan pada pembangunan bangsa dalam konteks yang lebih luas.

Dalam mengelola pembelajaran di PKBM harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu: "*man, money, materials, machines, methods, and market*". Keenam faktor tersebut merupakan sumber daya yang mendukung dalam mengelola pembelajaran di PKBM.

Program belajar yang diselenggarakan di PKBM digali dari kebutuhan masyarakat yang dikaitkan dengan potensi lingkungan yang tersedia. Menurut Sudjana (2000) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan akan sangat membantu dalam pemantapan proses pembelajaran. Sumber-sumber daya tersebut meliputi: (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam, (3) sumber daya budaya, (4) sumber daya teknologi.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu alternatif untuk dijadikan wahana pemberdayaan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan melalui pendekatan-pendekatan kultural dan persuasif.

Pelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menempatkan PKBM sebagai basis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat di tingkat operasional (desa/kelurahan). Pelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan dan menunjukkan kemampuan

masyarakat di dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program PLS sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Berdasarkan kondisi objektif di lapangan, pembelajaran di PKBM masih terfokus pada program pembelajaran yang bersifat standar, belum memanfaatkan potensi lokal yang ada di masyarakat. Hal ini terjadi karena pengelola PKBM masih terpaku pada acuan teknis tentang program yang dapat dikembangkan pada kelembagaan PKBM yaitu: Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, KBU, Program PADU. Hal ini didasarkan pada data hasil studi pendahuluan pada lima PKBM melalui observasi dan wawancara dengan pengelola PKBM. Program yang dikembangkan di setiap PKBM adalah: 1) di PKBM Bina Mandiri Cimahi, yaitu: Kejar Paket B, Keterampilan Merajut, Kelompok Belajar Menjahit, 2) di PKBM Bana Ulum Cimahi, yaitu: Kejar Paket B, Kelompok Kepemudaan, Program PAUD, 3) di PKBM Alpa Bandung, yaitu: Kejar Paket B, Program PAUD, KBU spare part, 4) di PKBM Bunga Nusantara Lembang, yaitu: Kursus Menjahit, Program PAUD, KBU limbah kayu dan sablon, Sanggar Seni, 5) di PKBM Kandaga Subang, yaitu: Kursus Menjahit, Kejar Paket B, Kelompok Kepemudaan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di atas, menunjukkan bahwa program pembelajaran di PKBM masih bersifat standar yang terfokus pada program pembelajaran Program Paket A, Program Paket B, Program PADU serta KBU. Program-program yang diselenggarakan tersebut belum sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Akibat penyelenggaraan program-program tersebut, berdampak pada keterasingan bagi warga belajar, sehingga mereka



yang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di PKBM, karena program yang diselenggarakan di PKBM dirasakan kurang bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupannya.

B. Perumusan Masalah

Penyelenggaraan PKBM berbasis masyarakat memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) inisiatif pembentukan dari masyarakat, (2) pengelolaan penyelenggaraan program dilakukan oleh masyarakat, (3) perencanaan dan penetapan program bertitik tolak dari pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat, (4) penyelenggaraan program diutamakan mendayagunakan potensi dan sumberdaya masyarakat, (5) pembiayaan diusahakan dari sumber yang ada di masyarakat, (6) tempat strategis dan sesuai kesepakatan masyarakat, (7) melibatkan lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan program kegiatannya, (8) memberikan layanan pendidikan baik individu maupun kelompok, (9) penyelenggaraan program berdasarkan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (10) terbuka untuk siapa saja, (11) tersedianya bahan belajar yang beragam, (12) memiliki fasilitator/ pendamping, (13) pendekatan pembelajaran multi media, (14) tersedianya tempat dan sarana belajar, (15) sebaiknya program kegiatan belajarnya bersifat reguler dan non reguler, (16) tersedia tempat Informasi dan dokumentasi.

Untuk menyelenggarakan PKBM berbasis masyarakat berdasarkan indikator yang diharapkan, dalam pengelolaan pembelajaran banyak faktor yang

mempengaruhinya yaitu: tutor, warga belajar, waktu pembelajaran, program pembelajaran, strategi pembelajaran, sarana pembelajaran, media pembelajaran, peran pemerintah, dan sumber daya.

Dalam mengelola pembelajaran di PKBM, tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu: (1) dalam kegiatan pembelajaran pada setiap PKBM masih terfokus pada juknis program yang baku, seperti program PADU, Paket A, Paket B, dalam makna belum memadukan dengan berbagai program yang lebih bervariasi, (2) dalam pembelajaran belum memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, sehingga menimbulkan dampak negatif, di antaranya: (a) keterasingan tentang program pembelajaran bagi peserta, (b) ketidakberlanjutan program, karena: kesulitan mencari bahan baku, dan hasil belajar tidak dapat dimanfaatkan dalam kehidupan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu ada beberapa upaya dan kreativitas, khususnya pengelola PKBM, bahwa dalam mengelola pembelajaran di PKBM diupayakan untuk memanfaatkan berbagai potensi lokal yang ada di masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembelajaran berbasis potensi lokal diharapkan akan menimbulkan rasa memiliki pada masyarakat, sehingga terjadi partisipasi penuh dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, karena dirasakan ada manfaat untuk kehidupannya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahannya yaitu: "Bagaimana model pengelolaan pembelajaran berbasis potensi lokal yang efektif di PKBM?"

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara khusus dijabarkan ke dalam rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pembelajaran secara empirik di PKBM?
2. Bagaimana model konseptual pengelolaan pembelajaran berbasis potensi lokal di PKBM?
3. Bagaimana efektivitas model pengelolaan pembelajaran berbasis potensi lokal di PKBM?

D. Definisi Operasional

Sebagai acuan mengenai beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, dijelaskan beberapa definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Pengelolaan pada intinya mengandung makna sebagai kegiatan yang dilakukan bersama melalui orang-orang atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi (Sudjana, 2000: 17). Pengelolaan merupakan sebuah proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan

sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, pengelolaan dimaksudkan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan di PKBM.

2. Pembelajaran

Pembelajaran adalah setiap upaya yang sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan ini terjadi interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu diantara peserta didik (warga belajar) dengan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan pembelajaran. (Sudjana, 2000:6).

Pembelajaran merupakan upaya pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadi kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan belajar dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, pembelajaran dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran berbasis potensi lokal di PKBM.

3. Potensi lokal

Potensi lokal adalah semua jenis sumber daya yang ada pada lingkungan masyarakat secara alamiah, yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan

Potensi lokal adalah sumber daya/kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk dapat dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Potensi lokal mempunyai kaitan erat dengan masukan lingkungan yang

mempunyai kontribusi mendukung untuk berlangsungnya proses dalam pembelajaran (Sudjana, 2000).

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan potensi lokal yaitu sumber daya yang berhubungan dengan potensi sosial, ekonomi, kelembagaan dan alam yang dapat mendukung terjadinya kegiatan pembelajaran di PKBM untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, sehingga memiliki dampak terhadap kehidupannya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang sudah diuraikan terdahulu, ada dua tujuan penelitian, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk menemukan model pengelolaan pembelajaran berbasis potensi lokal di PKBM, sehingga dapat memberdayakan warga belajar.

Tujuan khususnya yaitu untuk:

1. menggambarkan pengelolaan pembelajaran secara empirik di PKBM
2. mengembangkan model konseptual pengelolaan pembelajaran berbasis potensi lokal di PKBM
3. memperoleh data tentang efektivitas model pengelolaan pembelajaran berbasis potensi lokal di PKBM

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dikelompokkan secara teoritik dan praktis. Manfaat secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan prinsip-prinsip

pengelolaan pembelajaran berbasis potensi lokal di PKBM yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran pada setiap PKBM sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Manfaat secara praktis yaitu: (1) memberikan masukan pada lembaga penyelenggara pendidikan nonformal dalam mengelola pembelajaran yang berbasis potensi lokal di PKBM, (2) memberikan masukan kepada pengelola PKBM dalam menggali potensi lokal untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran di PKBM, (3) memberikan masukan pada masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembelajaran dalam kehidupan, (4) memberikan arah dan pedoman bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan.

G. Kerangka Pemikiran

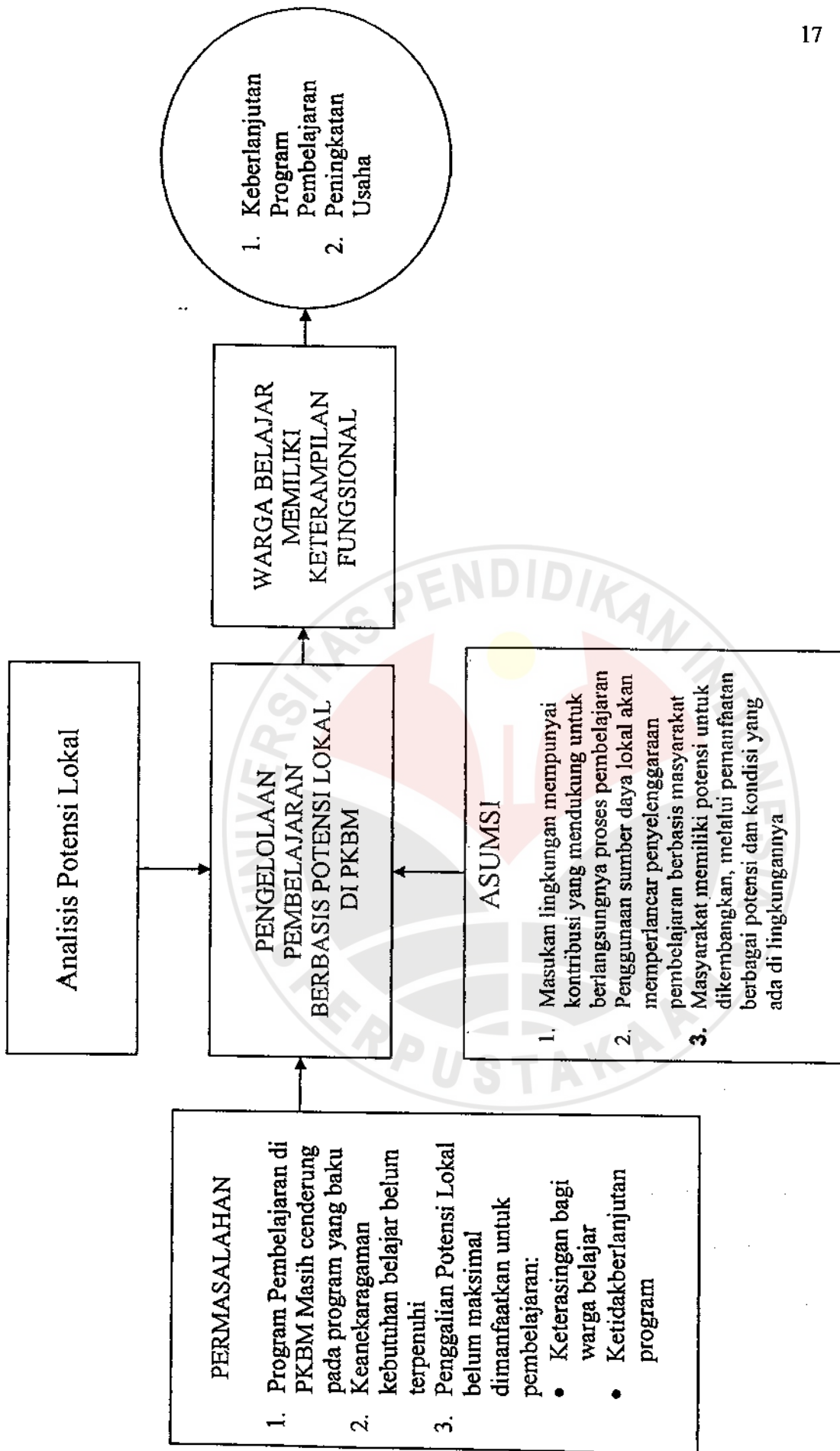
Pengelolaan pembelajaran sebagai sebuah sistem, memiliki berbagai komponen yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran di PKBM diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang ada di lingkungannya, sehingga kegiatan pembelajaran di PKBM itu betul-betul didasarkan pada makna pendidikan berbasis masyarakat, yaitu: dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pembelajaran di PKBM masih banyak permasalahan yang dihadapi, diantaranya kelembagaan masyarakat belum sepenuhnya berdasarkan pada kepemilikan masyarakat. Masyarakat masih tergantung pada program-program dari pemerintah, terutama yang sifatnya hibah. Akibat dari ketergantungan tersebut, apabila program bantuan selesai, maka

program tersebut tidak ada keberlanjutannya. Masalah lainnya, yaitu program-program yang ada pada PKBM belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat merasa asing dengan berbagai program yang ada di PKBM. Sumber daya yang ada di masyarakat sebetulnya dapat merupakan salah satu komponen yang dapat mendukung pembelajaran di masyarakat dalam rangka mewujudkan keberdayaan masyarakat.

Menurut Sudjana (2000), masukan lingkungan merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan program PLS apabila ditinjau dari pendekatan sistem. Hal ini terjadi karena masukan lingkungan mempunyai kontribusi yang mendukung untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Sumber daya yang perlu dikembangkan yaitu sumber daya lokal, karena sumber daya lokal dapat menunjang keberhasilan program pendidikan luar sekolah yang berbasis masyarakat. Dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, kegiatan pembelajaran di PKBM akan terus berlangsung dengan berlandaskan pada kemampuan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga akan menimbulkan rasa memiliki pada diri masyarakat yang akhirnya hasil pembelajaran akan lebih bermakna dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Kindervatter (1979) dan Stringger (1996), bahwa pada prinsipnya masyarakat itu memiliki potensi atau kekuatan yang dapat dikembangkan dalam kehidupannya, melalui partisipasi, kolaborasi, demokrasi, kesederajatan, pembebasan dan peningkatan.

Secara lebih terperinci kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran Penelitian Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Potensi Lokal